

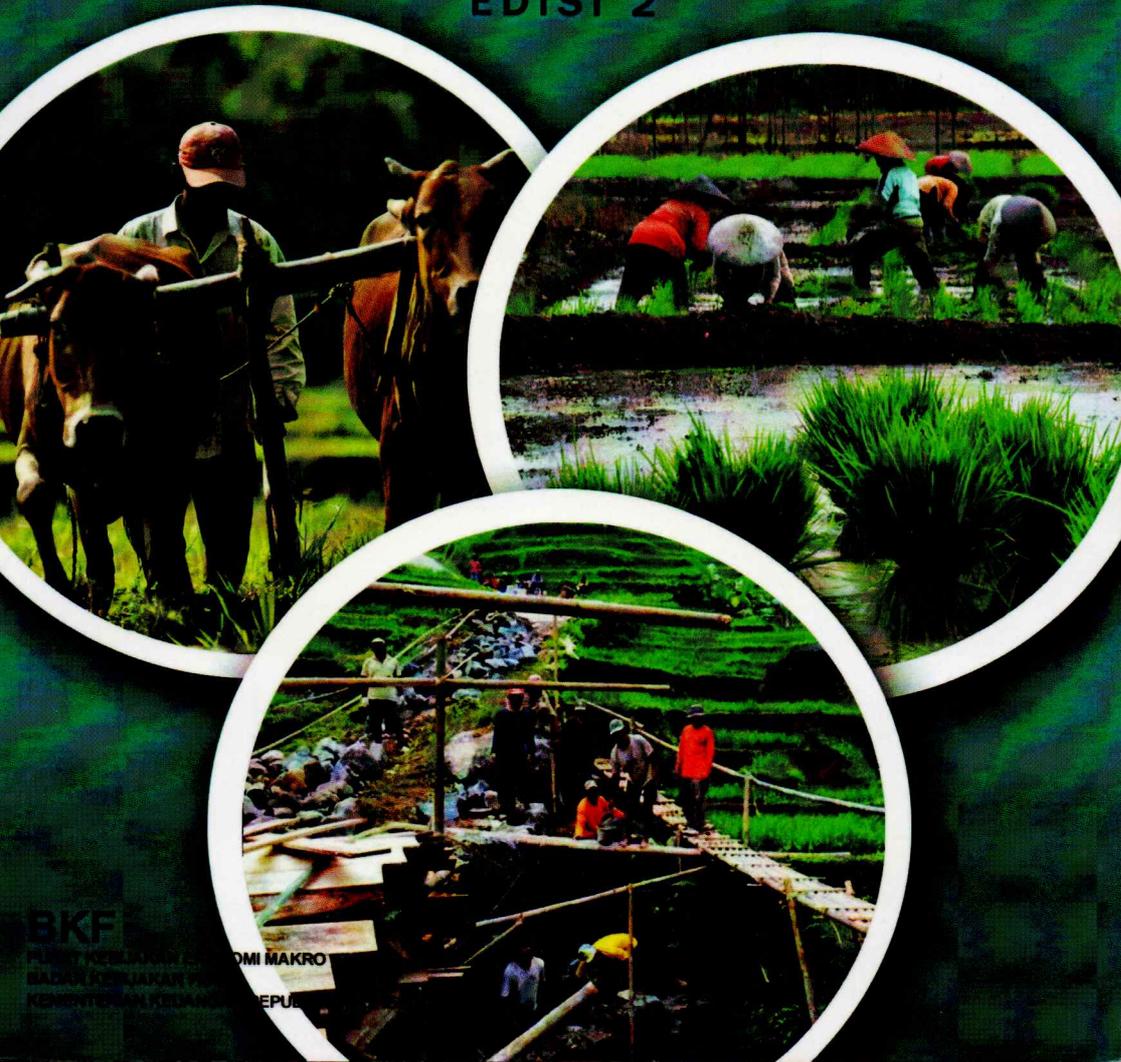


Kementerian Keuangan Republik Indonesia

# POLICY BRIEF FORUM EKONOMI

KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2015

EDISI 2



BKF  
PUSAT PENELITIAN DAN  
SARANA KEMAKHIRAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



# DAFTAR FORUM EKONOM

## KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2015

### I. Kelompok Ekonom Penguatan Kapasitas Kantor Wilayah Kementerian Keuangan

NAMA EKONOM	UNIVERSITAS
Prof. Dr. Nasir Azis	Universitas Syiah Kuala
Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec.	Universitas Sumatera Utara
Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc.	Universitas Andalas
Prof. Dr. HB. Isyandi, S.E., M.Sc	Universitas Riau
Dr. Dahlan Tampubolon, SE., M.Si.	Universitas Riau
Dr. M. Syurya Hidayat, SE., M.E.	Universitas Jambi
Prof. Dr. Bernadette Robiani, SE., M.Sc.	Universitas Sriwijaya
Devi Valeriani, S.E., M.Si.	Universitas Bangka Belitung
Retno Agustina Ekaputri, Ph.D	Universitas Bengkulu
Dr. Marselina Djayasinga, S.E., MPM.	Universitas Lampung
Dr. H. M. Kuswanto, M.Si.	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
I Kadek Dian Sutrisna Artha, Ph.D	Universitas Indonesia
Nury Effendi, Ph.D	Universitas Padjadjaran
Prof. Dra. Indah Susilowati, M.Sc., Ph.D.	Universitas Diponegoro
Dr. Rudi Purwono	Universitas Airlangga
Artidiatun Adji, Ph.D	Universitas Gadjah Mada
Prof. Dr. I Komang Gde Bendesa, M.A.D.E	Universitas Udayana
Prof. Dr. Mansur Afifi	Universitas Mataram
Dr. Thomas Ola L, S.E., M.Si.	Universitas Widya Mandira
Prof. Dr. Eddy Suratman	Universitas Tanjungpura

**POLICY BRIEF FORUM EKONOMI  
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2015  
Edisi 2**  
© Pusat Kebijakan Ekonomi Makro - Badan Kebijakan Fiskal

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
*All Rights Reserved*

Cetakan I, Januari 2016

Koreksi Typos : Zuprianto  
Desain Sampul & Tata Letak : Arief A Setiawan  
Pra-cetak : Zuprianto  
Ukuran : 15x 23 cm  
Halaman : 330 + xx  
ISBN : 978-602-17907-3-1

Diterbitkan oleh :  
PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
Gd. R.M. Notohamiprodo Lt. 8  
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta 10710 - Indonesia  
Telepon: +62-21-384-6379  
Faksimili: +62-21-381-0181  
Website: [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)

Perpustakaan Nasional RI, Katalog Dalam Terbitan(KDT)

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro - Badan Kebijakan Fiskal  
POLICY BRIEF FORUM EKONOMI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 Edisi 2/  
Prof. Robert Simanjuntak, PhD (editor) - Jakarta: PKEM BKF Kementerian Keuangan Republik  
Indonesia, 2016.  
350 hlm.; 23 cm  
Bibliografi : 327  
ISBN: 978-602-17907-3-1

1. Ekonomi

I. Judul

## DEWAN REVISI

Pembina  
Pengarah  
Koordinator FEKK  
Tahun 2015  
Penulis

Laporan & Dokumentasi

Editor

(Sekretariat: Tim  
Organisasi dan Tata Kelola  
Tim Biro Komunikasi  
Kementerian Keuangan  
Makro-BKF)

Alamat (Address)

Telepon (Phone)

Fax (Fax)

Website



Kementerian Keuangan Republik Indonesia

## DEWAN REDAKSI

---

**Pembina** : Prof. Suahasil Nazara, Ph.D.  
**Pengarah** : Parjiono, Ph.D.  
**Koordinator FEKK Tahun 2015** : Prof. Robert Simanjuntak, Ph.D.  
**Penulis** : Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) Tahun 2015  
**Laporan & Dokumentasi** : Tim Biro KLI, Sekretariat Jenderal  
Tim Humas Sekretariat BKF  
Tim PKEM, BKF  
**Editor** : Prof. Robert Simanjuntak, PhD

(**Sekretariat:** Tim Pusat Kebijakan Ekonomi Makro-BKF, Tim Organisasi dan Tata Laksana-Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Tim Biro Komunikasi dan Layanan Informasi-Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan; **Desain Grafis:** Tim Pusat Kebijakan Ekonomi Makro-BKF)

**Alamat (Address)** : Ged. R.M. Notohamiprodo Lt. 8  
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1  
Jakarta 10710 Indonesia  
**Telepon (Phone)** : (021) 3846379  
**Fax (Fax)** : (021) 3810181  
**Website** : [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)



# DAFTAR ISI

## Halaman

- i COVER
- iii Daftar FEKK Tahun 2015
- xi Dewan Redaksi
- xiii Kata Sambutan Kepala Badan Kebijakan Fiskal
- xv Prakata FEKK
- xvii Daftar Isi
- Prof. Dr. Raja Masbar, M.Sc. :
- 1** **EVALUASI DAN PERBAIKAN PROGRAM DANA DESA**
- Prof. Dr. I Komang Gde Bendesa, M.A.D.E. :
- 9** **EVALUASI DAN PERBAIKAN PELAKSANAAN DANA DESA DI BALI: MASALAH DAN REKOMENDASI**
- Dr. HM.Kuswantoro, M.Si. :
- 17** **EVALUASI DAN PERBAIKAN PROGRAM DANA DESA LAPORAN REKOMENDASI KEBIJAKAN AKHIR TAHUN 2015**
- Retno Agustina Ekaputri, Ph.D. :
- 27** **ROADMAP PROGRAM DANA DESA: EVALUASI DAN PERBAIKAN**
- DR. M. Syurya Hidayat, S.E., M.E. :
- 37** **EVALUASI DAN PERBAIKAN PROGRAM DANA DESA: SUATU PENDEKATAN *INTERREGIONAL LINKAGE* DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN KEUANGAN DESA**

- Prof. Dr. Eddy Suratman :
- 45** EVALUASI DAN PERBAIKAN PROGRAM DANA DESA
- Dr. Dahlan Tampubolon, S.E., M.Si. :
- 55** EVALUASI DAN PERBAIKAN PROGRAM DANA DESA
- Dr. Stellamaris Metekohy, S.E., M.Si. :
- 65** EVALUASI DAN PERBAIKAN PROGRAM DANA DESA
- Dr. Mukhtar A. Adam :
- 75** EVALUASI DAN PERBAIKAN PROGRAM DANA DESA
- Prof. Dr. Mansur Afifi :
- 87** EVALUASI DAN PERBAIKAN PROGRAM DANA DESA
- Dr. Thomas Ola, S.E., M.Si. :
- 97** EVALUASI DAN PERBAIKAN PROGRAM DANA DESA:  
SINERGI PUSAT DAN DAERAH
- Drs. Josephus Ronsumbre, M.Si. :
- 107** EVALUASI DAN PERBAIKAN PROGRAM DANA DESA
- Dr. Abd Hamid Paddu, MA. :
- 115** ANALISA DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DANA  
TRANSFER DAERAH: DALAM RANGKA MENDORONG  
PRODUKTIVITAS DAN PENURUNAN BIAYA EKONOMI,  
DAN PERBAIKAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN
- Drs. Taslim Arifin, MA. :
- 125** EVALUASI DAN PERBAIKAN PROGRAM DANA DESA
- Mohammad Ahlis Djirimu, S.E., DEA., Ph.D. :
- 135** EVALUASI DAN PERBAIKAN PROGRAM DANA DESA
- Prof. Dr. Muhammad Syarif, S.E., MS. :
- 145** EVALUASI DAN PERBAIKAN PROGRAM DANA DESA

- Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc. :
- 155** MEMBAGI BEBAN FISKAL KE DAERAH DAN DESA SEJALAN DENGAN PENINGKATAN DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DESA
- Masrizal, M.Soc., Sc. :
- 165** EVALUASI DAN PERBAIKAN PROGRAM DANA DESA
- Prof. Dr. Bernadette Robiani, S.E., M.Sc. :
- 173** EVALUASI DAN PERBAIKAN PROGRAM DANA DESA
- Wahyu Ario Pratomo, S.E., M.Ec. :
- 181** EVALUASI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DANA DESA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN KEMISKINAN DI PERDESAAN
- Prof. Dr. Abdul Halim, S.E., Akt., MBA. :
- 193** EVALUASI DAN PERBAIKAN PROGRAM DANA DESA
- Prof. Dr. Nasir Azis :
- 203** EFEKTIFITAS DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH
- Hj. Devi Valeriani, S.E., M.E. :
- 211** AKSELERASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH
- Dr. Muh. Amir Arham, M.E. :
- 219** BELANJA PUBLIK BIDANG INFRASTRUKTUR MEMERLUKAN PERBAIKAN UNTUK MENGATASI MASALAH KEMISKINAN DI GORONTALO
- Dr. Rudi Purwono :
- 229** PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI JAWA TIMUR DALAM Mendukung PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM JANGKA PANJANG

- Dr. Marselina Djayasinga, SE, MPM :
- 243** IDENTIFIKASI MASALAH DAN ALTERNATIF SOLUSI  
EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DAERAH
- Dr. Rully Wurarah :
- 255** EFEKTIVITAS DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI WILAYAH PAPUA BARAT
- Prof. DR. HB. Isyandi, SE, MSc :
- 265** EFEKTIVITAS DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DAERAH
- Dr. Tadjuddin Parenta, MA :
- 279** EFEKTIVITAS DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DAERAH
- Dr. Noldy Tuerah, S.E., MA. :
- 287** EFEKTIVITAS DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DI DAERAH
- Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, M.Sc. :
- 299** PERLUKAH *TAX AMNESTY*?
- Muhammad Handry Imansyah, Ph.D :
- 307** KEBIJAKAN *TAX AMNESTY*: APAKAH PRASYARATNYA?
- Dr. Agus Tony Poputra, S.E., Ak., MM., MA. :
- 317** ANALISIS DAN REKOMENDASI TERKAIT *TAX AMNESTY*
- 327** DAFTAR PUSTAKA

EVALUASI

## MEMBAGI BEBAN FISKAL KE DAERAH DAN DESA SEJALAN DENGAN PENINGKATAN DANA TRANSFER KE DAERAH DAN DESA

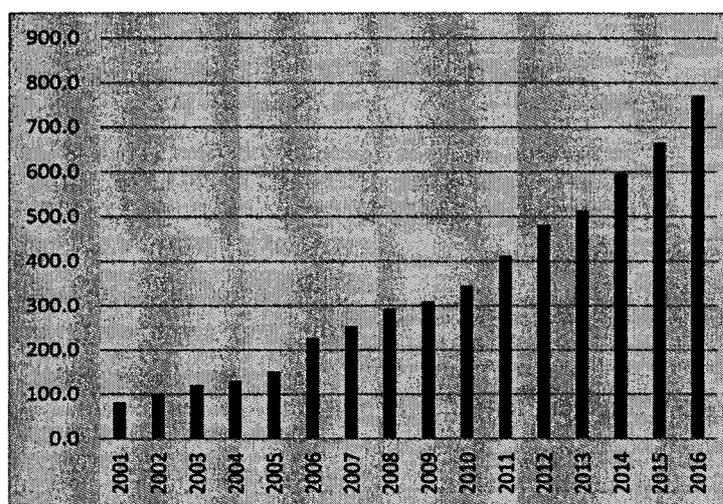
Dr. Hefrizal Handra, M.Soc., Sc.

Ekonom Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Barat

### Pengantar

Salah satu tujuan utama dari APBN Perubahan 2015 adalah meningkatkan dana transfer ke Daerah dan Desa. Demikian juga untuk tahun 2016, Dana Transfer khususnya Dana Alokasi Khusus meningkat tajam dan Dana Desa untuk tahun 2016 bahkan meningkat sekitar 124% dibandingkan tahun 2015. Untuk tahun 2017, APBN 2016, serta direncanakan meningkat terus hingga tahun 2019. Namun peningkatan Dana transfer ke Daerah dan Desa menimbulkan pertanyaan sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan riil Pemerintah Daerah terkait dengan tugasnya.

Gambar 1. Dana Transfer ke Daerah dan Desa (Dalam Triliun/Rp)



Sumber: Diolah dari data Kemenkeu dan BPS

Di sisi lain, tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan belanja Pemerintah Pusat juga terus meningkat. Pemerintah memerlukan dana untuk membangun infrastruktur skala nasional yang diperkirakan tidak kurang dari Rp. 5000 triliun untuk lima tahun. Demikian juga belanja bidang kesehatan yang sudah ditingkatkan paling sedikit 5% dari APBN. Tidak kalah pentingnya, belanja Negara untuk program jaring pengaman sosial, diperkirakan akan terus meningkat di masa mendatang.

Tabel 1. Penerimaan dan Belanja Negara (% PDB)

Tahun	Penerimaan Negara			Belanja Negara			Defisit
	Pajak	Bukan Pajak	Total	Pem. Pusat	Transfer ke Daerah	Total	
2001	11.3%	7.0%	18.3%	15.8%	4.9%	20.7%	-2.5%
2002	11.5%	4.9%	16.4%	12.3%	5.4%	17.7%	-1.3%
2003	12.0%	4.9%	16.9%	12.7%	6.0%	18.7%	-1.7%
2004	12.2%	5.3%	17.6%	13.0%	5.7%	18.6%	-1.0%
2005	12.5%	5.3%	17.8%	13.0%	5.4%	18.4%	-0.5%
2006	12.3%	6.8%	19.1%	13.2%	6.8%	20.0%	-0.9%
2007	12.4%	5.4%	17.8%	12.7%	6.4%	19.1%	-1.3%
2008	13.3%	6.5%	19.8%	14.0%	5.9%	19.9%	-0.1%
2009	11.0%	4.0%	15.1%	11.2%	5.5%	16.7%	-1.6%
2010	11.2%	4.2%	15.4%	12.1%	5.3%	17.5%	-0.7%
2011	11.8%	4.5%	16.2%	11.9%	5.5%	17.4%	-2.1%
2012	11.9%	4.3%	16.2%	12.3%	5.8%	18.1%	-1.9%
2013	11.6%	3.8%	15.4%	12.9%	5.5%	18.4%	-2.4%
2014	12.7%	3.8%	16.6%	12.7%	5.9%	18.7%	-2.4%
2015	12.7%	2.3%	15.0%	11.3%	5.7%	16.9%	-1.9%
2016	12.0%	2.2%	14.2%	10.3%	6.0%	16.3%	-2.1%

Catatan: 2001-2014 Realisasi, 2015 APBN-P, 2016 RAPBN

Sumber: Diolah dari data Kemenkeu dan BPS

Keterbatasan sumber daya untuk membiayai penyelenggaraan Negara mengharuskan pembagian beban fiskal yang adil (fair) dan efisien. Peningkatan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa tanpa diikuti oleh tambahan penugasan, berpotensi mengakibatkan alokasi yang tidak efisien (*inefficient allocation*). Untuk itu, tulisan ini merekomendasikan perlunya tambahan penugasan pendanaan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengikuti kenaikan Dana Transfer dan Dana Desa.

Analisis Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Analisis terhadap kondisi keuangan antara Pusat dan Daerah dapat menjelaskan

Dana Transfer ke Daerah (dan dari tahun ke tahun, tidak hanya prosentase terhadap PDB (lihat tabel) dan semakin besar setelah adanya Belanja Pemerintah Pusat cenderung terhadap PDB, dikarenakan Pendapatan Sementara itu transfer ke Daerah memilih untuk mempertahankan secara rata-rata dibawah 2% PDB Keuangan Negara (UU 17 Tahun hingga 3% PDB. Penurunan Pendapatan terhadap PDB) terutama sejak tahun penurunan Pendapatan Negara Belanja Pendapatan Negara mestinya dapat mampu meningkatkan pendapatan perpajakan juga men Pemerintah Presiden SBY. Dengan tahun 2009, lebih memilih untuk pada menurunkan transfer ke daerah pendapatan Negara.

Tekanan terhadap Anggaran Negara tahun 2015 dengan diimplementasikan Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) jawaban terhadap janji-janji politik tidak ada tambahan penugasan ke Desa di peraturan tersebut. Penugasan Desa pada dasarnya tidak berbeda dengan di Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Desa berpotensi meningkatkan pendapatan tidak diikuti dengan tambahan penugasan dimulai dengan jumlah Rp. 20,8 Triliun drastis (125%) pada tahun 2016 dan Tahun 2019 (lihat tabel 2).

## Analisis Hubungan Keuangan Antar Tingkatan Pemerintahan

Analisis terhadap kondisi keuangan Negara dan hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah dapat menjelaskan beberapa hal berikut:

Dana Transfer ke Daerah (dan Desa) cenderung meningkat dari tahun ke tahun, tidak hanya secara nominal, bahkan dalam prosentase terhadap PDB (lihat tabel 1), terutama sejak tahun 2010 dan semakin besar setelah adanya Dana Desa mulai tahun 2015.

Belanja Pemerintah Pusat cenderung menurun dalam prosentase terhadap PDB, dikarenakan Pendapatan Negara juga terus turun. Sementara itu transfer ke Daerah ditingkatkan. Pemerintah memilih untuk mempertahankan defisit pada level yang aman, secara rata-rata dibawah 2% PDB, meskipun Undang-Undang Keuangan Negara (UU 17 Tahun 2003) memperbolehkan defisit hingga 3% PDB. Penurunan Pendapatan Negara (dalam rasio terhadap PDB) terutama sejak tahun 2006, lebih disebabkan oleh penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penurunan Pendapatan Negara mestinya dapat dihindari jika Pemerintah mampu meningkatkan pendapatan perpajakan. Namun pendapatan perpajakan juga mengalami stagnasi dalam periode Pemerintah Presiden SBY. Dengan kata lain, Pemerintah sejak tahun 2009, lebih memilih untuk mengurangi belanja Pusat dari pada menurunkan transfer ke daerah untuk merespon penurunan pendapatan Negara.

Tekanan terhadap Anggaran Negara keseluruhan juga muncul di tahun 2015 dengan diimplementasikannya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa). Dana Desa muncul sebagai jawaban terhadap janji-janji politik satu milyar satu Desa. Padahal tidak ada tambahan penugasan yang spesifik kepada Pemerintah Desa di peraturan tersebut. Penugasan kepada Desa dalam UU Desa pada dasarnya tidak berbeda dengan penugasan sebelumnya di Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Artinya, keberadaan Dana Desa berpotensi meningkatkan inefisiennya belanja Negara jika tidak diikuti dengan tambahan penugasan yang jelas. Dana Desa dimulai dengan jumlah Rp. 20,8 Triliun di tahun 2015, meningkat drastis (125%) pada tahun 2016 dan akan terus meningkat hingga Tahun 2019 (lihat tabel 2).

Tabel-2. Dana ke Desa (Triliun Rp)

	2015	2016	2017	2018	2019
Dana Desa Dari Pusat	20.8	47	81.2	103.8	111.9
Alokasi Dana Perimbangan Kab/Kota	34.2	37.6	42.2	55.9	60.3
Bagi Hasil PAD Kab/Kota	4.1	4.3	4.9	5.7	6.4
Pertanian Dana yang Dikelola Desa	59.1	88.9	128.3	165.4	185.4

Sumber: Road Map Dana Desa, Kemenkeu RI

Dari uraian sebelumnya terlihat bahwa Pemerintah Pusat perlu membagi beban fiskal ke Daerah dan Desa. Dua hal penting yang perlu dilakukan Pemerintah Pusat, yaitu (1) memberikan tambahan penugasan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, (2) Mengantisipasi potensi tambahan beban fiskal yang besar di masa mendatang terutama terkait belanja untuk program jaminan sosial.

Tambahan penugasan kepada Pemerintah Daerah, terutama tentunya untuk bidang pemerintahan yang urusannya dibagi antara pusat dan daerah seperti bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan bidang lintas sektoral seperti program jaminan sosial. Untuk bidang yang sepenuhnya menjadi tugas Pusat seperti pertahanan dan keamanan maka beban fiskalnya sudah pasti menjadi tanggungjawab Pusat.

Salah satu contoh tambahan tanggungjawab pendanaan (beban fiskal) yang dapat dilimpahkan ke Pemerintah Daerah untuk bidang Kesehatan adalah pengawasan obat dan makanan (ke Propinsi). Kemudian untuk bidang pendidikan, Pemerintah Daerah perlu didorong untuk mendirikan unit pendidikan vokasi dan lembaga pelatihan tenaga kerja trampil. Sedangkan untuk bidang pekerjaan umum, banyak sektor yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena kondisinya yang memang masih jauh dibawah standar minimum.

Untuk program jaminan sosial nasional, Pemerintah perlu mengantisipasi potensi tambahan beban fiskal yang besar di masa mendatang dengan membagi beban fiskal ke Pemerintah Daerah bahkan ke Desa sejalan dengan peningkatan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Membagi beban fiskal antar tingkatan Pemerintahan pada dasarnya adalah mendistribusikan resiko pendanaan layanan

beban fiskal hanya ditanggung oleh...  
dapatan negara dapat mengga...  
nun jika beban tersebut dibagi, m...  
distribusi

Sementara itu untuk tambah...  
Pemerintah Desa, program jaminan...  
alternatif. Pemerintah perlu mengant...  
skal yang besar di masa mendatang...  
Pemerintah Daerah bahkan ke D...  
na Transfer ke Daerah dan Dana D...  
katan Pemerintahan pada das...  
ke pendanaan layanan. Jika beb...  
Pemerintah Pusat, penurunan pend...  
nan publik tersebut. Namun jika b...  
biayaan juga akan terdistribusi

Sebagian besar resiko fiskal pada...  
tanggung pemerintah nasional, te...  
skal menanggung beban fiskalnya...  
tanggungjawab belanja) kepada P...  
na, terutama untuk mendanai fung...  
meningkatkan akuntabilitas l...  
k menyediakan pelayanan publi...  
partisipasi dalam program jamin...

### Kesimpulan dan Rekomendasi

Analisis di atas dapat disimp...  
tingkatkan dana transfer ke D...  
dapatan negara mengalami tek...  
sional sejalan dengan pening...  
Pemerintah Pusat mengalami tek...  
arunan belanja dalam rasio ter...  
n diperkirakan akan menghad...  
k mempertahankan dan me...  
sional serta belanja jaminan sosial

Untuk itu tingkat transfer ke D...  
la level tertentu tanpa harus men...

Jika beban fiskal hanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat, penurunan pendapatan negara dapat mengganggu layanan publik tersebut. Namun jika beban tersebut dibagi, maka resiko pembiayaan juga akan terdistribusi

Sementara itu untuk tambahan penugasan pendanaan ke Pemerintah Desa, program jaminan sosial nasional adalah salah satu alternatif. Pemerintah perlu mengantisipasi potensi tambahan beban fiskal yang besar di masa mendatang dengan membagi beban fiskal Pemerintah Daerah bahkan ke Desa sejalan dengan peningkatan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Membagi beban fiskal antar Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah mendistribusikan resiko pendanaan layanan. Jika beban fiskal hanya ditanggung oleh Pemerintah Pusat, penurunan pendapatan negara dapat mengganggu layanan publik tersebut. Namun jika beban tersebut dibagi, maka resiko pembiayaan juga akan terdistribusi

Sebagian besar resiko fiskal pada akhirnya memang akan menjadi tanggungan pemerintah nasional, termasuk jika Pemerintah Daerah gagal menanggung beban fiskalnya. Namun membagi beban fiskal (tanggungjawab belanja) kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, terutama untuk mendanai fungsi yang sudah didesentralisasikan dan meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Desa dapat meningkatkan pelayanan publik lokal yang lebih baik dan turut berpartisipasi dalam program jaminan sosial nasional.

### Kesimpulan dan Rekomendasi

Analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pilihan kebijakan meningkatkan dana transfer ke Daerah dan Desa dalam kondisi pendapatan negara mengalami tekanan dan tidak meningkat secara struktural sejalan dengan peningkatan PDB, telah menempatkan Pemerintah Pusat mengalami tekanan fiskal yang berakibat kepada peningkatan belanja dalam rasio terhadap PDB. Pemerintah Pusat ke depan diperkirakan akan menghadapi peningkatan kebutuhan belanja untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas infrastruktur nasional serta belanja jaminan sosial nasional.

Oleh karena itu tingkat transfer ke Daerah dan Desa perlu dipertahankan pada level tertentu tanpa harus mengorbankan pelayanan publik lokal

dan pembangunan daerah. Namun karena janji politik menghendaki Pemerintah untuk meningkatkan dana transfer, sebaiknya hal tersebut diikuti dengan membagi beban fiskal (tanggungjawab belanja) antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Desa. Peningkatan Dana transfer.

Berikut alternatif yang mungkin diimplementasikan dalam rangka membagi beban fiskal ke Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa adalah:

1. *Sharing* beban fiskal dana pensiun PNS antara Pusat dan Daerah. Pemerintah perlu mengubah sistem pensiun PNS dari "pay as you go (PAYGO)" ke sistem "fully funded". Dengan sistem PAYGO, Pemerintah Pusat bertanggungjawab membayar dana pensiun PNS setelah mereka pensiun hingga meninggal bahkan sampai ke duda/janda pensiunan. Dengan sistem *fully funded*, Pemerintah hanya membayar dana pensiun ketika PNS tersebut bekerja, dan PNS tersebut akan menerima tabung dana pensiun tersebut begitu mereka memasuki usia pensiun. Dengan sistem *fully funded* memungkinkan untuk membagi beban dana pensiun dengan Pemda dan Desa. Pemda dan Desa harus ikut bertanggungjawab untuk membayar sebagian dari Dana Pensiun PNS Daerah. Sistem ini mungkin dapat diterapkan untuk PNS yang baru diangkat. Dengan kata lain, untuk PNS yang baru diangkat, Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang mempekerjakan PNS tersebut membayar iuran pensiun PNS tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan (tentu ditambah potongan gaji sebagai iuran individu PNS). Dengan itu berarti akan terjadi pembagian beban fiskal untuk iuran pensiun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat membayar tambahan iuran pensiun PNS Pusat, Pemerintah Daerah membayar tambahan iuran pensiun PNS Daerah. Kemudian jika PNS tersebut pensiun, BPJS tenaga kerjalah yang sepenuhnya bertanggungjawab membayar pensiun sesuai kontribusi. Jika alternatif ini bisa dilakukan, secara bertahap beban APBN untuk pembayaran langsung untuk pensiun aparat negara akan berkurang.
2. Terkait dengan Dana Desa, salah satu alternatif yang mungkin diimplementasikan pada tahun 2017 adalah membagi beban fiskal

iuran BPJS masyarakat miskin ke Desa diperkirakan akan menerima lebih banyak. Pada tahun 2017, Dana Desa, jumlah Dana akan ditingkatkan menjadi Rp 1,5 Triliun. Rencana peningkatan Dana Desa pada tahun 2017, lebih dari cukup untuk membiayai kesehatan penduduk miskin di Desa. Desa diberi tanggungjawab untuk membiayai asuransi kesehatan warga miskin di Desa tersebut lebih dari cukup. Pemerintah harus mengalokasikan sebagian dari iuran BPJS Kesehatan ke Desa untuk mendorong Pemerintah Desa lebih aktif dalam program untuk mengatasi masalah kesehatan dalam menetapkan warga yang terdampak. Hal ini berpotensi menimbulkan *moral hazard* Pemerintah yang terkategori miskin untuk tidak membayar iuran karena mereka tidak ikut memba

iuran BPJS masyarakat miskin ke Pemerintah Desa. Pemerintah Desa diperkirakan akan menerima dana transfer yang semakin membesar. Pada tahun 2017, sesuai dengan roadmap Dana Desa, jumlah Dana akan ditingkatkan menjadi sekitar Rp. 80 Triliun. Rencana peningkatan Dana Desa sekitar Rp. 33 Triliun pada tahun 2017, lebih dari cukup untuk membayar iuran BPJS Kesehatan penduduk miskin di Desa. Sehingga, jika Pemerintah Desa diberi tanggungjawab untuk membayar setengah dari asuransi kesehatan warga miskin di Desa tersebut, dipastikan dana tersebut lebih dari cukup. Pemerintah Pusat tetap membayarkan sebagian dari iuran BPJS Kesehatan penduduk miskin. Usulan ini akan mendorong Pemerintah Desa untuk ikut bertanggungjawab dalam program untuk mengatasi kemiskinan dan semakin baik dalam menetapkan warga yang terkategori miskin. Selama ini, ada potensi *moral hazard* Pemerintah Desa dalam menentukan warga yang terkategori miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan karena mereka tidak ikut membayar.



**BKF**

PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO  
BADAN KEBIJAKAN FISKAL  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Gd. R.M. Notohamidjo Lt. 8  
Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1  
Jakarta 10710 Indonesia  
telepon : 021-3846379  
fax : 021-3810181  
Website : [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)

ISBN 9786021790731



9 786021 790731